

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan tentang Kompetensi Kewarganegaraan

a. Pengertian Kompetensi Kewarganegaraan

Kompetensi yang berasal dari kata *competence* menurut Spencer diartikan sebagai karakteristik mendasar dari seseorang yang berhubungan dengan timbal balik dengan suatu kriteria efektif dan atau kecakapan terbaik seseorang dalam suatu pekerjaan atau keadaan. Hal ini bahwa kompetensi tersebut cukup mendalam dan bertahan lama sebagai bagian dari kepribadian seseorang sehingga dapat digunakan untuk memprediksi perilaku seseorang ketika berhadapan dengan berbagai situasi dan masalah. Kompetensi juga dapat menyebabkan atau memprediksi perubahan perilaku. Kemudian, kompetensi juga dapat menentukan serta memprediksi apakah seseorang dapat bekerja dengan baik atau tidak dalam ukuran yang spesifik, tertentu, dan standar.¹⁷ Misalnya dalam melakukan kerja sama, ada orang yang melakukannya dengan tekun, sabar, dan selalu mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya, sementara di pihak lain ada orang yang bermalas-malasan, tidak sabaran dan hanya ingin

¹⁷ Novan Ardy Wiyani, *Desain Pembelajaran Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal.57

mencari untung sendiri.¹⁸ Masnur Muslich mengungkapkan bahwa pada dasarnya kompetensi merupakan daya cakup, daya rasa, dan daya tindak seseorang yang siap diaktualisasikan saat menghadapi tantangan kehidupannya, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang.¹⁹

Komponen utama pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) yang perlu diajarkan kepada peserta didik mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan/kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) dan sikap watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Pembagian atas ketiga domain ini tampak kesejajarannya dengan tiga ranah yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) bisa disejajarkan dengan domain atas ranah kognitif, keterampilan/kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) sejajar dengan domain atau ranah psikomotorik, sedangkan sikap/watak kewarganegaraan (*civic disposition*) sejajar dengan domain atau ranah afektif.

¹⁸ Nur Kholis, "Mengurangi Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Pendekatan Pendidikan Multikultural" Jurnal Al-Tahrir, Vol. 14, No. 2 Mei 2014: 433-453 dalam <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/download/165/130>, (FTIK IAIN Tulungagung), diakses pada 14 Juli 2020.

¹⁹ Masnur Muslich, KTSP: *Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Konstektual* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 16.

b. Tujuan Kompetensi Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi sebagai pendidikan karakter bertujuan mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart dan good citizen*), yakni menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kajian tentang Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga Negara yang baik selalu menimbulkan kerumitan, karena: pertama, pendidikan kewarganegaraan selalu bersentuhan dengan kepentingan politik kenegaraan sehingga rentan untuk dimanfaatkan sebagai alat mempertahankan kepentingan kekuasaan suatu rezim politik. Kedua, konsep kewarganegaraan berkaitan dengan, atribut "baik" dari seorang warga negara juga berarti mengandaikan perlunya wilayah kajian etika (filsafat moral) kenegaraan. Ketiga, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan hak-hak dan kewajiban warga negara terhadap negara (urusan publik) tetapi juga membangun seorang warga negara yang berpartisipasi aktif, yakni tidak hanya menjadi "warga negara yang baik" (*good citizen*) tetapi juga menjadi "warga negara yang aktif" (*active citizen*).

c. Ruang Lingkup Kompetensi Kewarganegaraan

1) *Civic Knowledge*

Civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan atau isi apa saja yang seharusnya diketahui oleh warga negara.²⁰ *Civic knowledge* berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara. Dikatakan bahwa “*Civic-related knowledge, both historical and contemporary, such as understanding the structure and mechanics of constitutional government, and knowing who the local political actors are and how democratic institutions function.*”²¹

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkaitan dengan materi atau substansi yang harus diketahui warga negara. Komponen pengetahuan diwujudkan dalam bentuk pemaknaan terhadap struktur dasar sistem kehidupan bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan, dan bernegara. Setiap orang perlu memiliki kesempatan untuk mempelajari pemerintahan dan masyarakat madani. Pembekalan materi tersebut akan membantu siswa membuat pertimbangan yang luas dan penuh nalar tentang hakekat kehidupan bermasyarakat, berpolitik, dan berpemerintahan, dan mengapa politik dan pemerintahan itu diperlukan; tujuan pemerintahan; ciri-ciri

²⁰ Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.....*, hal.107

²¹ *Ibid.*, hal.108

penting pemerintahan (terbatas dan tidak terbatas); hakekat dan tujuan konstitusi; dan cara-cara alternatif mengorganisasikan pemerintahan.²²

Pada perkembangan berikutnya, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran baru menggantikan Kewarganegaraan 2004 berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006, secara tersirat pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) terjabar ke dalam dan mencakup pengetahuan mengenai 8 ruang lingkup kajian, yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa; Norma, Hukum, dan Peraturan; Hak Asasi Manusia; Kebutuhan Warga Negara; Konstitusi Negara; Kekuasaan dan Politik; Pancasila; dan Globalisasi.²³

Penting bagi guru PKn untuk memahami bagaimana menentukan dan mendesain model pembelajaran yang mampu mengembangkan pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan (*civic knowledge*). Atau dengan kata lain bagaimana merancang pendekatan, strategi, metode, maupun teknik yang dapat mengembangkan ranah kognitif siswa.

Pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dalam pembelajaran PKn pada umumnya seringkali dirasakan membosankan bagi siswa, sebab guru seringkali menanamkan kemampuan untuk mengingat (pengetahuan) dengan metode

²² Deny Setiawan, Pendidikan Kewarganegaraan....., hal.64

²³ Winarno, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.....,hal.110

ceramah. Pembelajaran ranah kognitif pada umumnya didominasi oleh ceramah atau pemberian informasi tunggal dari guru. Guru PKn juga terjebak pada model pembelajaran demikian untuk ranah kognitif. Menjadi kebiasaan guru untuk bertindak sebagai pemberi informasi, mengembangkan budaya belajar menerima dengan mengembangkan model berpikir hafalan (Suwarna, 2007). Pembelajaran PKn diwarnai kuat oleh orientasi pada pencapaian target kurikulum. Menjadikan belajar PKn terpusat pada satu arah dan kurang memberikan kesempatan aktif siswa untuk berpikir. Membelajarkan ranah kognitif dengan cara memberi banyak informasi konsep-konsep PKn. Akibatnya mata pelajaran PKn oleh siswa cenderung dianggap sebagai pelajaran hafalan.

Model pembelajaran PKn harus disesuaikan dengan tujuan mata pelajaran Pkn, yaitu agar siswa mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif; berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas; berkembang secara positif, demokratis dan mampu berinteraksi dalam hubungan antar warga. Jika menganalisis tujuan di atas, maka mempertegas pemahaman kita bahwa hakikat pembelajaran PKn adalah wahana pengembangan berpikir kritis, artinya pembelajaran dimaknai sebagai proses pengembangan berpikir kritis peserta didik, bukan pembelajaran yang bersifat hafalan.

Berpikir kritis pada hakikatnya mengembangkan unsur pemikiran rasional dan empiris berdasar pengetahuan ilmiah. Pemikiran kritis adalah anti dogmatis dan anti propaganda serta kebalikan dari pemikiran tradisional.²⁴ Dengan berpikir kritis maka dapat menemukan kebenaran secara objektif, berani mengkritisi berbagai ketidakberesan di masyarakat, mampu menunjukkan kelemahan-kelemahan selanjutnya sebagai bahan informasi untuk mengambil tindakan rasional dalam bersikap terhadap sesuatu. Berpikir kritis merupakan reaksi atas berpikir tradisional yang cenderung menutup-nutupi realitas, hanya untuk mendukung status quo serta kelestarian kekuasaan yang ada.

Pembelajaran sebagai wahana berpikir kritis sebenarnya telah menjadi tradisi dalam *social studies* dimana pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) sebagai intinya, yaitu tradisi “*reflective inquiry*.” Melalui tradisi ini, pembelajaran sesungguhnya berpusat pada siswa, karena siswalah yang menjadi subjek pembelajaran untuk melakukan sendiri kegiatan menganalisis, mengkaji, berargumentasi, berpendapat, dan memberi penilaian akademik atas materi PKn sedang guru bertugas memfasilitasi proses itu. Dengan demikian

²⁴ *Ibid.*, hal.118

pendekatan PKn yang ideal menekankan pada pendekatan yang berpusat pada siswa (*student centered approach*).²⁵

2) *Civic Disposition*

Civic Disposition atau watak/sikap kewarganegaraan adalah sikap yang mencerminkan suatu kesopanan yang mencakup kehormatan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisisme, pengenalan terhadap kemerdekaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip – prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi pada keberagaman, kesabaran dan keajegan, keharuan, kemurahan hati dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya. Sikap-sikap kewarganegaraan di atas merupakan sikap kewarganegaraan yang semestinya harus dimiliki siswa untuk menjadi warga negara yang baik.²⁶ Perilaku seseorang merupakan bentuk respon terhadap lingkungan eksternalnya yang bersumber dari keinginan, harapan, dan tujuan untuk menyesuaikan dengan dinamika dunia eksternalnya.²⁷

²⁵ Ibid., hal.144

²⁶ Witman Syahroni, *Pengaruh Penggunaan Buku Teks Berbasis Nilai Sebagai Sumber Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Sikap Kewarganegaraan (Civic Disposition)*, (Jakarta : Universitas Pendidikan Indonesia, 2016), hal.5

²⁷ Nur Kholis, “Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islam Melalui Budaya Sekolah, Edukasi”, Jurnal Volume 05, Nomor 02, November 2017: 047 – 065 dalam <http://staim-tulungagung.ac.id/ejournal/index.php/EDUKASI/article/download/291/216>, (FTIK IAIN Tulungagung), diakses pada 14 Juli 2020.

Watak kewarganegaraan (*civic disposition*) sebagai komponen dasar ketiga *civic education* menunjuk pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*. Pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasanya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab dari tiap individu.

Tujuan utama dari *civic disposition* adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara, baik karakter privat seperti; tanggungjawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, maupun karakter publik misalnya; kepedulian sebagai warga, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan kompromi.²⁸

Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah

²⁸ Budi Mulyono, Reorientasi Civic Disposition Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membentuk Warga Negara Yang Ideal, "Jurnal Civics" Volume 14 Nomor 2, 2017

penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses.

Sikap sebagai salah satu ranah yang sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam belajar. Menurut Popham (1995), ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang.²⁹ Orang yang tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu sulit untuk mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Seseorang yang berminat dalam suatu mata pelajaran diharapkan akan mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Oleh karena itu, semua pendidik harus mampu membangkitkan minat semua peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Selain itu ikatan emosional sering diperlukan untuk membangun semangat kebersamaan, semangat persatuan, semangat nasionalisme, rasa sosial, dan sebagainya.

Untuk itu semua dalam merancang program pembelajaran, satuan pendidikan harus memperhatikan ranah afektif. Keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif dan psikomotor dipengaruhi oleh kondisi afektif peserta didik. Peserta didik yang memiliki minat belajar dan sikap positif

²⁹ Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.....*, hal.194

terhadap pelajaran akan merasa senang mempelajari mata pelajaran tertentu, sehingga dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Walaupun para pendidik sadar akan hal ini, namun belum banyak tindakan yang dilakukan pendidik secara sistematis untuk meningkatkan minat peserta didik. Kepala sekolah, sebagai pimpinan team (*team leader*) memberikan dorongan, motivasi, arahan, dan penggerak dinamika kelompok team inti agar setiap komponen internal lembaga memiliki visi dan/pandangan yang sama.³⁰ Oleh karena itu, untuk mencapai hasil belajar yang optimal, dalam merancang program pembelajaran dan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik, pendidik harus memperhatikan karakteristik afektif peserta didik.

3) *Civic Skills*

Komponen esensial kedua dari *Civic Education* (Pendidikan Kewarganegaraan) dalam masyarakat demokratis adalah keterampilan atau kecakapan-kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*). Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang

³⁰ Nur Kholis dan Rofikatul Karimah, “Aksi Budaya Teo-Ekologi Melalui Integrasi Kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup”, Jurnal Al-Tahrir, Vol. 17, No. 2 November 2017 : 451-470 dalam <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/download/958/754>, (Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung, Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya), diakses pada 14 Juli 2020.

diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara.³¹ Isi dari *civic skills* ada dua, yaitu *intellectual skills* (kecakapan intelektual) dan *participatory skills* (kecakapan partisipatoris). Branson (1998) menyatakan sebagai berikut :³²

“Jika warga negara mempraktikkan hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan dasar sebagaimana diwujudkan dalam lima pertanyaan sebagaimana diuraikan di muka, namun mereka perlu memiliki kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan.”

Kecakapan-kecakapan intelektual yang penting untuk seorang warga negara yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab, disebut sebagai kemampuan berpikir kritis. *The National Standards of Civic and Government* dan *The Civic Framework for 1998 National Assessment of Educational Progress* (NAEP) membuat kategori mengenai kecakapan-kecakapan ini adalah *identifying and describing; explaining and analysing; and evaluating, taking, and defending positions on public issues* (Branson, 1998). Kecakapan intelektual itu

³¹ Deny Setiawan, Pendidikan Kewarganegaraan....., hal.64

³² Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.....*, hal.164

meliputi kemampuan mengidentifikasi, menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, menilai, mengambil, dan mempertahankan posisi atas suatu isu.³³

Civic Education yang bermutu memberdayakan seseorang untuk mengidentifikasi atau memberi makna yang berarti pada sesuatu yang berwujud seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, monumen nasional, atau peristiwa-peristiwa politik dan kenegaraan seperti hari kemerdekaan. *Civic education* juga memberdayakan seseorang untuk memberi makna atau arti penting pada sesuatu yang tidak berwujud seperti nilai-nilai ideal bangsa, cita-cita dan tujuan negara, hak-hak mayoritas dan minoritas, *civic society*, dan konstitusionalisme. Kemampuan untuk mengidentifikasi bahasa dan simbol-simbol emosional juga sangat penting bagi seorang warga negara. Mereka harus mampu menangkap dengan jelas maksud-maksud hakiki dari bahasa dan simbol-simbol emosional yang digunakan.

Kecakapan-kecakapan intelektual lain yang dipupuk oleh *civic education* yang bermutu adalah kemampuan mendeskripsikan. Kemampuan untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi dan proses-proses seperti sistem *checks and balances* atau *judicial review* menunjukkan adanya pemahaman. Melihat

³³ *Ibid.*, hal.170

dengan jelas dan mendeskripsikan kecenderungan-kecenderungan seperti berpartisipasi dalam kehidupan kewarganegaraan, imigrasi, atau pekerjaan, membantu warga negara untuk selalu menyesuaikan diri dengan peristiwa-peristiwa yang sedang aktual dalam pola jangka waktu yang lama.³⁴

Di samping mensyaratkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pendidikan untuk warga negara dan masyarakat demokratis harus difokuskan pada kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah, dalam proses politik dan dalam *civil society monitoring and influencing*. (Branson, 1998). Kecakapan berinteraksi (*interacting*) berkaitan dengan kecakapan-kecakapan warga negara dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Berinteraksi adalah menjadi tanggap terhadap warga negara yang lain. Interaksi berarti bertanya, menjawab, dan berunding dengan santun, demikian juga membangun koalisi-koalisi dan mengelola konflik dengan cara yang damai dan jujur.³⁵

Adalah sangat penting untuk membangun kecakapan partisipatoris sejak awal sekolah dan terus berlanjut selama masa sekolah. Murid yang paling muda, dapat belajar dan

³⁴ *Ibid.*, hal.173

³⁵ *Ibid.*, hal.174

berinteraksi dengan kelompok-kelompok kecil dalam rangka mengumpulkan informasi, bertukar pikiran dan menyusun rencana-rencana tindakan sesuai dengan taraf kedewasaan mereka. Mereka dapat belajar untuk menyimak dengan penuh perhatian, bertanya secara efektif, dan mengelola konflik melalui mediasi, kompromi, atau menjalin konsensus. Murid-murid yang lebih senior dan seyogyanya dapat mengembangkan kecakapan-kecakapan memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik. Mereka hendaknya belajar bagaimana meneliti isu-isu politik dengan menggunakan perangkat-perangkat elektronik, perpustakaan, telepon, kontak personal, dan media.

Kecenderungan pembelajaran PKn yang hanya berorientasi pada pemahaman akan *civic knowledge* perlu diubah, apalagi sebatas mengajarkan konsep-konsep keilmuan PKn yang sifatnya hafalan. Oleh karena itu, orientasi pada *civic knowledge* harus dilanjutkan pada pengembangan sub ranah *cognitive/intellectual civic skills* sebab pada dasarnya *cognitive/intellectual civic skills* siswa tidak dapat dipisahkan dengan *civic knowledge*. Kita dapat berasumsi bahwa dengan mengembangkan sub ranah *cognitive civic skills* maka pemahaman akan *civic knowledge* akan terikutkan, namun jika hanya membelajarkan *civic knowledge* belum tentu *cognitive civic skills* terikutkan. Contoh sederhana, jika guru PKn ingin

membelajarkan cara-cara mempengaruhi kebijakan publik, maka siswa terlebih dahulu perlu dipahami konsep kebijakan publik. Akan tetapi, jika guru hanya memberikan pengertian dan pemahaman tentang apa itu kebijakan publik belum tentu siswa memiliki *intellectual civic skills*.³⁶

Pembelajaran lainnya adalah pengembangan sub ranah keterampilan partisipatoris (*participatory skills*) sebagai bagian pula pada *civic skills*. Ranah keterampilan kewarganegaraan bila disandingkan dengan pengelompokan Benjamin S Bloom tentang taksonomi pembelajaran, maka ia sejajar dengan aspek psikomotorik. Meskipun sejajar, namun tetap perlu dibedakan. Dalam taksonomi Bloom, yang dimaksud ranah psikomotor adalah hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Padahal keterampilan kewarganegaraan yang dimaksudkan bukanlah keterampilan dengan dengan kekuatan fisik, tetapi lebih pada keterampilannya berpartisipasi pada kehidupan publik sebagai bentuk dari tanggungjawab kewarganegaraannya. Keterampilan partisipatoris ini meliputi keterampilan berinteraksi, keterampilan mempengaruhi jalannya pemerintahan,

³⁶ *Ibid.*, hal.172

pengambilan keputusan publik, berkoalisi mengelola konflik, dan sebagainya.³⁷

2. Tinjauan tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pembelajaran jika ditinjau dari sudut kebahasaan berasal dari kata ajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ajar merupakan kata benda yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang agar diketahui. Pembelajaran diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menjadikan orang untuk belajar. Kemudian, belajar sendiri berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, latihan, berubah tingkah laku, atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman.³⁸ Jadi, pada hakikatnya pembelajaran adalah proses menjadikan orang agar mau belajar dan mampu (kompeten) belajar melalui berbagai pengalamannya agar tingkah lakunya dapat berubah menjadi lebih baik lagi.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia diartikan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya adalah peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.³⁹

³⁷ *Ibid.*, hal.175

³⁸ Novan Ardy Wiyani, *Desain Pembelajaran Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal.19

³⁹ Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.....*, hal.6

b. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk watak atau karakteristik warga negara yang baik. Menurut Baswan, tujuan pendidikan kewarganegaraan meliputi :⁴⁰

- 1) Mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya.
- 2) Mau berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan bertanggung jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan.
- 3) Bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia sehingga memiliki wawasan dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai, yang memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁴⁰ Baswan, Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PKn pada Materi Susunan Pemerintahan Daerah Melalui Metode Bermain Peran di Kelas IV, Jurnal kreatif Tadulako Online, Vol.3 No.4, 2013, Hal.264

c. Ruang Lingkup Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Terdapat 4 substansi yang sudah mengalami perubahan dalam Kurikulum 2013 tentang ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan yang nantinya akan melebur ke dalam sejumlah rumusan kompetensi dasar yaitu sebagai berikut :⁴¹

- 1) Pancasila
- 2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4) Bhineka Tunggal Ika

Berdasarkan uraian di atas, ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan yang melebur ke dalam sejumlah kompetensi dasar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

d. Metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Di dalam proses pembelajaran, terdapat bermacam-macam metode. Berikut penjelasan dari beberapa metode tersebut.⁴²

1) Metode Pemberian Tugas dan Resitasi

Pemberian tugas di sini mempunyai arti guru menyuruh anak didik misalnya membaca, tetapi dengan menambahkan tugas-tugas seperti mencari dan membaca buku-buku lain sebagai

⁴¹ Apiek Gandamana, *Perbandingan Kompetensi Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar*, Jurnal Sekolah, Vol.2 No.2, 2018, hal.18

⁴² Jamal Ma'mur Asmani, *7 Tips Aplikasi PAKEM*, (Diva Press: Yogyakarta, 2014), hal.32-50

perbandingan, atau disuruh mengamati orang/ masyarakatnya setelah membaca buku itu. Maka, pemberian tugas adalah suatu pekerjaan yang harus anak didik selesaikan tanpa terikat tempat. Melalui pemberian tugas peserta didik akan dibiasakan untuk bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

2) Metode Diskusi

Diskusi merupakan alternatif jawaban untuk memecahkan berbagai problem kehidupan. Dengan catatan persoalan yang akan didiskusikan harus dikuasai secara mendalam. Melalui metode diskusi, peserta didik akan belajar untuk saling bertukar pendapat dalam memecahkan persoalan yang diberikan. Selain itu, peserta didik akan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan peduli sosial. Selain itu, akan melatih untuk mengutarakan pendapat dengan menggunakan bahasa yang santun.

3) Metode Latihan

Metode latihan (*driil*) disebut juga metode *training*, yaitu suatu cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Di samping itu, metode ini dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Melalui

metode ini akan membantu guru dalam menanamkan pembiasaan positif.

4) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab diartikan sebagai cara mengajar yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah secara langsung antara guru dengan murid. Melalui ini, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan murid memberikan jawaban. Murid juga dapat diberi kesempatan bertanya untuk selanjutnya dijawab oleh guru.

Metode tanya jawab ditandai adanya interaksi aktif antara guru dengan murid atau terciptanya hubungan saling timbal balik diantara keduanya. Jadi, dapat dikatakan bahwa metode tersebut berguna meningkatkan minat dan gairah murid dalam mengikuti proses pembelajaran. Melalui komunikasi aktif dengan guru, murid dapat memanfaatkan momen ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan menanamkan sikap sosial percaya diri.

e. Penilaian Pembelajaran

Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar. Tujuan penilaian pembelajaran adalah:

1) Mengetahui pencapaian indikator yang telah ditetapkan.

- 2) Memperoleh umpan balik bagi guru untuk mengetahui hambatan dalam pembelajaran maupun efektivitas pembelajaran.
- 3) Memperoleh gambaran yang jelas tentang perkembangan, pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik.
- 4) Sebagai acuan menentukan rencana tindak lanjut (remedial, pengayaan, dan pemantapan).

Alat penilaian dapat berupa tes dan non tes. Tes mencakup tertulis, lisan, atau perbuatan, catatan harian perkembangan peserta didik, dan portofolio. Pada kegiatan pembelajaran di kelas awal penilaian lebih banyak digunakan adalah melalui pembelajaran tugas dan portofolio. Guru menilai anak melalui pengamatan, lalu dicatat pada sebuah buku. Sedangkan tes tertulis digunakan menilai kemampuan menulis peserta didik, khususnya untuk mengetahui penggunaan tanda baca, ejaan, kata atau angka.

f. Penanaman Kompetensi Kewarganegaraan melalui Pembelajaran PKn

1) Definisi Penanaman

Penanaman adalah proses perbuatan atau cara menanamkan.⁴³ Sedangkan secara operasional, penanaman adalah suatu tindakan atau perilaku untuk menanamkan suatu hal. Penanaman merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan

⁴³WJS. Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 895

seseorang dengan tujuan dapat mempengaruhi kepercayaan, kepribadian, maupun tingkah laku individu. Penanaman yang berarti proses atau cara, perbuatan menanam, menanamkan atau menanamkan. Jadi penanaman dapat dikatakan sebagai proses pembentukan terhadap sesuatu yang dilaksanakan secara terus menerus.⁴⁴

Jadi, penanaman menurut peneliti adalah merupakan proses menanamkan sesuatu pemahaman tentang hal yang sifatnya berguna bagi diri sendiri untuk memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu, penanaman kompetensi kewarganegaraan adalah proses usaha memahamkan perilaku positif kepada perseorangan maupun kelompok. Penanaman kompetensi kewarganegaraan diperlukan agar tercipta hubungan timbal balik yang baik.

2) Strategi dalam Penanaman Kompetensi Kewarganegaraan

Ada lima strategi yang perlu diperhatikan dan digunakan oleh guru, lima strategi guru tersebut sebagai berikut.⁴⁵

a) Guru Menjadi Teladan (*Role Model*)

⁴⁴ Jumiatun, *Penanaman Nilai Karakter Siswa Sekolah Dasar Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Seni Tari Sdn Negeri Batusari 5 Mranggen*, (Semarang : Universitas PGRI Semarang, 2016), hal.5

⁴⁵ Teuku Ramli Zakaria, "Pengembangan Sikap Spiritual dan Sikap Sosial pada Siswa dalam Implementasi Kurikulum 2013", dalam <http://www.bsnp-indonesia.prg>, Buletin BSNP Vol.IX/No.2/Juni2014 Jakarta Selatan, diakses pada 18 Oktober 2019

Guru harus berupaya supaya diri dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Untuk ini, guru harus memiliki integritas kepribadian yang baik, menguasai materi dan kompetensi mata pelajaran dengan cara yang menarik. Guru harus berusaha supaya dirinya menjadi orang yang pantas *digugu lan ditiru*.

b) Memberi Nasihat

Pada momen-momen yang tepat dalam proses pembelajaran, guru perlu memberi nasihat dan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan norma-norma kehidupan, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang perlu diperhatikan dan diamalkan oleh peserta didik, untuk memperoleh kebaikan dalam kehidupan bersama. Nasihat dan penjelasan-penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan perkembangan penalaran dan kedewasaan peserta didik. Melalui strategi ini, peserta didik dapat menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam nasihat secara alamiah, tidak dengan terpaksa.

c) Memberi Ganjaran

Guru perlu memberikan ganjaran positif (*positive reinforcement*) kepada peserta didik untuk perilaku yang baik dan hasil belajar yang baik. Sebaliknya, guru perlu memberikan ganjaran negatif (*negative reinforcement*) untuk

perilaku dan hasil belajar yang kurang baik. Melalui ganjaran ini, nilai-nilai kebaikan akan tumbuh dan menguat dalam diri peserta didik. Sebaliknya, nilai-nilai negatif secara perlahan akan menipis, berkurang dan ditinggalkan.

d) Membiasakan Pengamalan Nilai-Nilai Positif

Di dalam kehidupan di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik perlu dibiasakan untuk mengamalkan nilai-nilai kebaikan. Misalnya, salaman ketika bertemu, saling membantu sesama kawan, peduli terhadap sesama, dan sebagainya. Maka, nilai-nilai kebaikan tersebut akan diinternalisasikan oleh peserta didik, untuk selanjutnya akan menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kepribadian mereka.

e) Menciptakan Kondisi Kondusif di Sekolah

Ruang kelas dan lingkungan sekolah harus menjadi laboratorium bagi peserta didik untuk mengamalkan nilai-nilai kebaikan, yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial. Perlu diwujudkan kondisi yang kondusif bagi peserta didik untuk mudah mengamalkan nilai-nilai kebaikan tersebut di sekolah. Misalnya, dalam rangka mengembangkan sikap spiritual (KI I) peserta didik, bagi yang beragama Islam, untuk menjalankan ibadah shalat, tempat mudhuknya dijangkau dan bersih, tempat shalatnya bersih, rapi, nyaman, dan sebagainya. Demikian juga dalam menanamkan berbagai nilai dan sikap

spiritual serta sikap sosial yang lain, harus diwujudkan kondisi yang kondusif dalam rangka pengamalan nilai-nilai tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sunarti pada tahun 2019 dengan judul “Pembentukan Karakter Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas III A di MI Muhammadiyah Pasirmuncang Purwokerto Barat”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu pembentukan karakter peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas III A MI Muhammadiyah Pasirmuncang dilakukan dengan metode pembiasaan, keteladanan, hukuman, anjuran, perintah dan larangan, menciptakan suasana kondusif, terintegrasi dan terinternalisasi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Siwi Septiana dan M. Ragil Kurniawan tahun 2017 dengan judul “Penerapan Model *Problem Based Learning* untuk Meningkatkan Berpikir Kritis Siswa Kelas 5 Pada Mata Pelajaran PKn di SD Muhammadiyah Kauman”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan model *problem based learning* dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 pada mata pelajaran PKn SD Muhammadiyah Kauman Tahun Ajaran 2016/2017.

Peningkatan kemampuan berpikir kritis pada siswa ditandai dengan meningkatnya rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa yaitu dari Siklus I ke Siklus II sebesar 51,61 % menjadi 70,97 %. Kauman Tahun Ajaran 2016/2017. Peningkatan kemampuan berpikir kritis pada siswa ditandai dengan meningkatnya rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa yaitu dari Siklus I ke Siklus II sebesar 51,61 % menjadi 70,97 %.

3. Penelitian lain dilakukan oleh Abdul Basar pada tahun 2012 dengan judul “Pengaruh Media Video Berbasis Nilai dalam Mengembangkan Watak Kewarganegaraan (*Civic Desposition*) Siswa Pada Pembelajaran Pkn”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat perbedaan pengembangan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) siswa antara kelas yang menggunakan media video berbasis nilai dengan kelas yang tidak menggunakan media video berbasis nilai (konvensional).
4. Penelitian lain dilakukan oleh Nadlirotul Muniroh pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi Nilai Nasionalisme dan Gotong Royong dalam Mata Pelajaran Pkn di MI Pabelan dan Mi Miftahun Najihin Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2017/2018”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam proses penanaman nilai karakter nasionalisme dan gotong royong di MI Pabelan dan MI Miftahun Najihin melalui beberapa strategi yaitu penciptaan budaya madrasah, ruang berkarakter,

keteladanan guru dengan penanaman nilai di dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mardenta Nur Yudi Verdana Putra pada tahun 2013 dengan judul “Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Menggunakan Metode Sosiodrama terhadap Kepedulian Sosial Siswa Kelas V di SD Negeri Selang”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu pembelajaran PKn dengan menggunakan metode sosiodrama memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepedulian sosial siswa kelas V SD Negeri Selang tahun ajaran 2012/2013. Hal tersebut ditunjukkan dengan uji t pada post test kelompok eksperimen-kontrol yang menunjukkan perbedaan signifikan antara post test kelompok eksperimen dan kontrol setelah diberikan treatment.
6. Penelitian lain dilakukan oleh Tri Fitriani Putri pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Examples Non Examples terhadap Hasil Belajar PKn di Kelas V SD Negeri 106805 Desa Manunggal Labuhan Deli”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Examples Non Examples pada mata pelajaran PKn di kelas V SD Negeri 106805 Desa Manunggal Labuhan Deli mendapat nilai rata-rata 80,135. Hasil belajar siswa jauh lebih baik setelah dilakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Examples Non Examples. Terdapat pengaruh yang

signifikan terhadap model pembelajaran Examples Non Examples pada mata pelajaran PKn di kelas V SD Negeri 106805 Desa Manunggal Labuhan Deli. Hal ini dibuktikan dengan hasil hipotesis dimana tarafnya $\alpha = 0,05$ thitung $>$ ttabel yaitu $3,666 > 1,997$.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sunarti: Pembentukan Karakter Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas III A di MI Muhammadiyah Pasirmuncang Purwokerto Barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan karakter peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas III A MI Muhammadiyah Pasirmuncang dilakukan dengan metode pembiasaan, keteladanan, hukuman, anjuran, perintah dan larangan, menciptakan suasana kondusif, terintegrasi dan terinternalisasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilakukan pada Pembelajaran PKn. 2. Menggunakan penelitian kualitatif 3. Penelitian dilakukan pada jenjang pendidikan dasar (madrasah ibtidaiyah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian tersebut meneliti tentang pembentukan karakter peserta didik sedangkan yang diteliti oleh peneliti adalah penanaman kompetensi kewarganegaraan
2.	Tri Siwi Septiana dan M. Ragil Kurniawan: Penerapan Model <i>Problem Based Learning</i> untuk Meningkatkan Berpikir Kritis Siswa Kelas 5 Pada Mata Pelajaran PKn di SD Muhammadiyah Kauman.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kritis pada siswa ditandai dengan meningkatnya rata-rata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilakukan pada pembelajaran PKn 2. Penelitian dilakukan pada jenjang pendidikan dasar (madrasah ibtidaiyah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan penelitian kuantitatif 2. Penelitian tersebut meneliti tentang penerapan model

		<p>hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa yaitu dari Siklus I ke Siklus II sebesar 51,61 % menjadi 70,97 %.Kauman Tahun Ajaran 2016/2017. Peningkatan kemampuan berpikir kritis pada siswa ditandai dengan meningkatnya rata-rata hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa yaitu dari Siklus I ke Siklus II sebesar 51,61 % menjadi 70,97 %.</p>		<p><i>problem based learning</i> sedangkan yang diteliti oleh peneliti adalah penanaman kompetensi kewarganegaraan</p>
3.	<p>Abdul Basar: Pengaruh Media Video Berbasis Nilai dalam Mengembangkan Watak Kewarganegaraan (<i>Civic Disposition</i>) Siswa Pada Pembelajaran PKn</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengembangan watak kewarganegaraan (<i>Civic Disposition</i>) siswa antara kelas yang menggunakan media video berbasis nilai dengan kelas yang tidak menggunakan media video berbasis nilai (konvensional).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilakukan pada pembelajaran PKn 2. Meneliti salah satu kompetensi kewarganegaraan (<i>Civic Disposition</i>) 3. Penelitian dilakukan pada jenjang pendidikan dasar (madrasah ibtidaiyah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan penelitian kuantitatif. 2. Meneliti tentang pengaruh media video berbasis nilai

4.	Nadlirotul Muniroh: Implementasi Nilai Nasionalisme dan Gotong Royong dalam Mata Pelajaran Pkn di MI Pabelan dan MI Miftahun Najihin Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2017/2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penanaman nilai karakter nasionalisme dan gotong royong di MI Pabelan dan MI Miftahun Najihin melalui beberapa strategi yaitu penciptaan budaya madrasah, ruang berkarakter, keteladanan guru dengan penanaman nilai di dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilakukan pada Pembelajaran PKn. 2. Menggunakan penelitian kualitatif 3. Penelitian dilakukan pada jenjang pendidikan dasar (madrasah ibtidaiyah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian tersebut meneliti tentang implementasi nilai nasionalisme dan gotong royong sedangkan yang diteliti oleh peneliti adalah penanaman kompetensi kewarganegaraan
5.	Mardenta Nur Yudi Verdana Putra: Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Menggunakan Metode Sosiodrama terhadap Kepedulian Sosial Siswa Kelas V di SD Negeri Selang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PKn dengan menggunakan metode sosiodrama memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepedulian sosial siswa kelas V SD Negeri Selang tahun ajaran 2012/2013. Hal tersebut ditunjukkan dengan uji t pada post test kelompok eksperimen-kontrol yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilakukan pada Pembelajaran PKn. 2. Penelitian dilakukan pada jenjang pendidikan dasar (madrasah ibtidaiyah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan penelitian kuantitatif 2. Penelitian tersebut meneliti tentang pengaruh pembelajaran menggunakan metode sosiodrama sedangkan yang diteliti oleh peneliti adalah penanaman kompetensi kewarganegaraan

		menunjukkan perbedaan signifikan antara post test kelompok eksperimen dan kontrol setelah diberikan treatment.		
6.	Tri Fitriani Putri: Pengaruh Model Pembelajaran Examples Non Examples terhadap Hasil Belajar PKn di Kelas V SD Negeri 106805 Desa Manunggal Labuhan Deli	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Examples Non Examples pada mata pelajaran PKn di kelas V SD Negeri 106805 Desa Manunggal Labuhan Deli mendapat nilai rata-rata 80,135. Hasil belajar siswa jauh lebih baik setelah dilakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Examples Non Examples.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilakukan pada Pembelajaran PKn. 2. Penelitian dilakukan pada jenjang pendidikan dasar (madrasah ibtidaiyah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan penelitian kuantitatif 2. Penelitian tersebut meneliti tentang pengaruh pembelajaran menggunakan metode sosiodrama sedangkan yang diteliti oleh peneliti adalah penanaman kompetensi kewarganegaraan

C. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi perilaku yang di dalamnya ada konteks kusus atau dimensi waktu.⁴⁶ Paradigma ialah garis besar rancangan pertimbangan rasional yang dijadikan oleh penulis sebagai pijakan dan pendampingan dalam menyelenggarakan penelitian lapangan.

Saat melakukan penelitian, paradigma penelitian memiliki peran yang sangat penting. Paradigma merupakan pedoman seorang peneliti dalam mencari fakta-fakta melakukan kegiatan penelitian yang dilakukan.⁴⁷ Sehingga paradigma penelitian tersebut menjadi dasar pokok dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih dalam penanaman kompetensi kewarganegaraan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa di MIN 3 Tulungagung yaitu dengan pembelajaran untuk *Civic Knowledge*, pembiasaan untuk *Civic Disposition* dan keteladanan untuk *Civic Skills* agar diperoleh peningkatan kompetensi kewarganegaraan terhadap siswa. Sehingga paradigma penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 49

⁴⁷ Zaenal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 146

Bagan 2.1 Paradigma Penelitian

